



Mencegah Konflik: Sosialisasi Sebagai Alat Distribusi Kuasa dan Produksi Pengetahuan pada Tahap Pra-Pembangunan Objek Wisata

Retno Angraeni S^{1*}, Citra Buana Halil²

¹Universitas Cenderawasih, Papua

²Universitas Khairun, Ternate

*Correspondence: retnoangraeni27@gmail.com

Article History

Published
29/12/2025

Copyright © 2025
The Author(s): This
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)



Abstrak

Pembangunan objek wisata kerap kali menjadi daya tarik tersendiri, untuk itu pemerintah melakukan langkah penting untuk terus memajukan sektor pariwisata. Memanfaatkan sektor ini demi mendapatkan keuntungan ekonomi bukanlah hal yang salah. Namun, mesti digaris bawahi bahwa pembangunan itu kerap kali menimbulkan sentimen yang berujung pada resistensi pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kehadiran objek wisata itu. Melalui tulisan ini kami mencoba memberikan pemaparan mengenai pentingnya sosialisasi yang selama ini selalu menyertai sebuah proyek pembangunan, urgensi untuk mengkaji proses sosialisasi menggunakan analitis foucalt tentang kekuasaan dan pengetahuan dirasa mampu memberikan pencerahan mengapa model sosialisasi konvensional yang selama ini harus diganti dengan model sosialisasi partisipasi yang menekankan kerjasama. Melalui tulisan ini dipaparkan bahwa untuk demi memuluskan jalan bagi rencana pembangunan, pemerintah atau pemilik kuasa tidak harus mengutamakan instrumen teknis tetapi harus ada penekanan lebih untuk memperoleh izin sosial dengan jalan melibatkan masyarakat sebagai agen yang berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sebuah objek wisata. Pada akhirnya memberikan ruang sosialisasi yang baik mampu menguatkan relasi kerjasama keseluruhan pihak dan berakhir dengan munculnya konsep pariwisata berkelanjutan yang keuntungannya dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Konflik, Objek Wisata , Pembangunan, Pariwisata, Sosialisasi.

Abstract

The Development of tourism objects often becomes an attraction in itself, prompting the government to take significant steps to continuously advance the tourism sector. Leveraging this sector for economic gain is not wrong. However, it should be emphasized that such development often sparks sentiments leading to resistance from parties who disagree with the plan. Through this writing, we attempt to explain the importance of the socialization process, which has always accompanied development projects. The urgency to analyze the process using Foucauldian analytics of power and knowledge is believed to enlighten us on why the conventional socialization model must be replaced with a participatory model that emphasizes collaboration. This Paper argues that in order to make the plan work, the government and those in charge should not prioritize technical instruments alone, but also have to put their attention on obtaining social license by including the community as active contributors. Providing a proper platform for public engagement can strengthen collaborative partnerships among all parties and lead to the concept of sustainable tourism. The benefits can be enjoyed by everyone involved.

Keywords: Conflict, Tourist Attractions, Development, Tourism, Socialization.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata masih menjadi sektor unggulan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Sumber daya alam dan budaya Indonesia yang beragam menjadi daya tarik unggulan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor yang banyak diminati khususnya oleh para investor dari dalam dan luar negeri (Aliansyah & Hermawan, 2019). Pengembangan pariwisata mendatangkan banyak manfaat seperti pembangunan daerah, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat lokal, terjaganya budaya dan identitas nasional, dengan berbagai alasan inilah pemerintah dengan menggandeng pihak investor berbondong-bondong mengembangkan potensi objek wisata yang ada agar bisa dinikmati dan mendatangkan keuntungan ekonomi, sosial dan budaya (Rusneni et al., 2025).

Dibalik banyaknya manfaat dari sektor pariwisata ini, kita tidak lepas dari realitas dimana pembangunan objek wisata kerap kali menimbulkan resistensi dan konflik dari masyarakat lokal. Konflik ini sering kali di dasari pada benturan kepentingan dan pengetahuan, untuk itu dengan sangat lugas perlu ditekankan perhatian khusus pada fase sebelum pembangunan objek wisata dimulai. Tahap pra-pembangunan dapat dikatakan sebagai fase paling kritis mengingat pada fase inilah identifikasi awal dapat dilakukan, mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat seperti pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat dapat memberikan dampak baik sebagai jalan pencegahan masalah sebelum masalah itu terjadi. Pembangunan sebuah objek wisata memerlukan pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, lahan untuk itu perlu dilakukan Social Impact Assesemment (SIA), SIA merupakan proses yang membantu menganalisis, mengatur, dan mengelola hal terkait dengan isu sosial yang kiranya terdapat dalam sebuah proses pembangunan (Esteves et al., 2012).

Metode krusial yang dapat digunakan adalah sosialisasi, serangkaian kegiatan sosialisasi seperti melakukan Focus Group Discussion, pertemuan dengan masyarakat, wawancara serta penyebaran kuisisioner mampu menjadi pintu pembuka untuk memahami profil sosial, nilai kolektif, serta persepsi masyarakat yang terdampak dari adanya suatu pembangunan objek wisata. Rangkaian kegiatan sosialisasi itu tidak serta merta hanya sebagai formalitas belaka tetapi juga didalamnya terdapat sesuatu yang di sebut 'Social License to Operate', yang mana untuk mendapatkannya diperlukan interaksi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat (Vanclay & Hanna, 2019) Kegiatan sosialisasi yang baik mampu menghindarkan dari terjadinya aksi protes yang lahir dari ketidakpahaman berbagai pihak mengenai dampak positif yang ada dari pembangunan, kenyataannya banyak sosialisasi yang hanya dinilai sebagai bentuk pemberitahuan atau pembujukan, bukan melalui dialog dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Mendapatkan izin sosial tidak serta merta diraih dengan proses pemberitahuan semata tetapi lahir dari adanya kepercayaan, membangun kepercayaan antara masyarakat dan pihak seperti investor, pemerintah, dan akademisi mampu memfasilitasi aksi kolektif yang pada akhirnya mendorong penerimaan sosial yang baik pula (Stronge et al., 2024).

Proses sosialisasi selama ini hanya dipandang sebagai sebuah cara konvensional yang bertujuan untuk menyampaikan suatu aturan atau rencana terkait proyek pembangunan, tanpa disadari bahwa didalam prosesnya terdapat legitimasi kuasa dan pengetahuan. Dinamika pembangunan objek wisata sering kali berpusat pada perseteruan antara "realitas" dan "kebenaran", cara sosialisasi konvensional yang hanya berbentuk penyampaian dipandang sebagai alat yang membenarkan kuasa pihak otoriter atas sebuah proyek pembangunan. Teori foucault dapat digunakan sebagai fondasi analitis, dimana foucault memandang bahwa kuasa dan pengetahuan secara langsung saling melengkapi, untuk itu ketika ada wacana 'pembangunan' dan 'kepariwisataan' yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun sosialisasi yang baik, sosialisasi seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang netral dimana klaim kebenaran dibuktikan sehingga tidak lagi ada dominasi pemangku kepentingan seperti investor dan pemerintah terkait proyek pembangunan objek wisata tetapi muncul kombinasi dengan pengetahuan ter subordinasi yang dimiliki masyarakat yaitu pengetahuan historis, kultural dan ekologis (Foucault & Gordon, 1980) Melalui tulisan ini saya berusaha mengutarakan pentingnya sosialisasi ditahap pra-pembangunan objek wisata karena hal tersebut dapat menjadi langkah pencegahan konflik, dengan menggunakan teori foucault untuk menjelaskan mengapa sosialisasi konvensional yang sebelumnya hanya berpusat dan dipahami sebagai proses 'penyampaian' harus di transformasi menjadi sebuah arena distribusi kuasa dan ruang pengakuan pengetahuan yang beragam sehingga nantinya pengetahuan teknis pihak pemerintah dan investor dapat di kombinasikan dengan pengetahuan milik masyarakat sehingga terbentuklah pembangunan dan pariwisata yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur non-empiris. Fokusnya adalah analisis mendalam dan kritis mengenai konsep, teori dan temuan yang telah ada dalam pengetahuan yang telah di kaji sebelumnya (Snyder, 2019). Studi literatur bertujuan untuk memberikan pemahaman baru terhadap

permasalahan yang sudah ada, dengan melakukan metode ini fokus yang dikaji bisa di rangkum, dianalisis dan dikaitkan dengan kajian lainnya yang saling terhubung sehingga pada akhirnya bisa dibangun argumentasi baru (Paré et al., 2015).

Mengadaptasi teknik snowball sampling peneliti memanfaatkan pendalaman satu artikel ke artikel lainnya, studi ini mencoba melakukan penelusuran, evaluasi dan interpretasi data sekunder yang ada demi memberikan kejelasan terhadap fokus kajian. Tulisan ini memiliki kriteria inklusi (Xiao & Watson, 2019) dimana data sekunder yang digunakan fokus pada publikasi yang terbit dalam 10 hingga 15 tahun terakhir atau selama periode 2009-2024 dengan memanfaatkan kajian di bidang pariwisata, sosiologi, komunikasi pembangunan, adapun kata kunci yang digunakan 'konflik', 'pembangunan pariwisata', 'sosialisasi', 'partisipasi', dan 'kekuasaan atau pengetahuan'. Penulis mencoba menggambarkan kelemahan dari proses sosialisasi yang banyak dilakukan oleh pihak pemerintah dalam upaya membangun objek wisata, yang nantinya dapat memberi kejelasan mengapa sosialisasi harus dilakukan dengan baik dan teliti, selain itu melalui teori foucalt dapat dijelaskan bahwa sosialisasi dapat menjadi ruang pengakuan pengetahuan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan kekuasaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam wacana 'pembangunan' dan 'kepariwisataan' sehingga benturan yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dihindarkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sosialisasi Konvensional sebagai Alat Kuasa Pemerintah

Selama ini realitas menunjukkan bahwa dalam sebuah proyek pembangunan objek wisata kerap kali pemerintah melakukan model sosialisasi top-down, yang berupa rapat penyampaian informasi atau bahkan presentasi sederhana yang hanya mendengarkan satu pihak, atau dalam bentuk pembagian brosur bahwa disuatu tempat akan dibangun objek wisata. Hal ini tentu tidak memberikan efek yang baik, pada akhirnya karena ketidakmerataan sebuah informasi, persepsi yang terbentuk pun menjadi negatif. Model Sosialisasi konvensional menggambarkan kondisi bahwa dalam situasi penyebaran informasi terkait rencana pembangunan, sosialisasi dapat dijadikan sebagai teknologi kuasa yang berfungsi untuk menciptakan kepatuhan. Kepatuhan ini lahir dikarenakan dalam struktur ruang, alokasi waktu penyampaian informasi, dan narasi formal yang telah dipersiapkan secara ketat menggambarkan dengan jelas struktur dimana pengembang dan pemerintah berkedudukan sebagai pemilik kebenaran yang menyampaikan informasi mutlak bahwasanya pembangunan itu akan bermanfaat dan lain sebagainya, sementara disisi lain masyarakat hanya berkedudukan sebagai audiens yang harus menerima (Li et al., 2020). Kondisi ini dapat dikatakan sebagai Governmentality atau sebuah konsep pengarahan melalui teknik dan prosedur resmi yang dirasa mampu membimbing perilaku individu dan kelompok (Burchill et al., 1991).

Sosialisasi konvensional yang berkedudukan sebagai teknologi kuasa pada akhirnya memproduksi ketidaktautan, hal demikian terjadi karena informasi yang disampaikan dari atas kebawah hanya berpusat pada detail terkait teknis proyek, skema kompensasi masyarakat, uraian janji manfaat ekonomi, tetapi mengesampingkan wacana kritis mengenai detail sosio-ekologis jangka panjang, opsi pembangunan seperti pariwisata berbasis komunitas skala kecil, bahkan

mengabaikan hak masyarakat adat secara sengaja yang pada akhirnya pengetahuan lokal masyarakat dianggap sebagai pengetahuan yang tidak relevan, emosional, dan tidak berlandaskan fakta. Hal yang telah dipahami masyarakat terkait kondisi sekitar ditangkap menjadi hambatan yang memerlukan pendekatan persuasif dan ekonomi dalam penanganannya, semakin lama terkekang dalam model sosialisasi seperti ini maka sosialisasi konvensional dapat mengukuhkan monopoli pengetahuan pihak otoriter. Alih-alih membangun kepercayaan, sosialisasi konvensional dapat dianggap sebagai alasan yang menciptakan jarak antara pengembang dan masyarakat, tidak menutup kondisi ini memicu emosional masyarakat sehingga kedepannya mereka akan menolak komunikasi lanjutan yang kemudian lebih memilih jalan konfrontatif. Untuk itu mempertahankan model sosialisasi konvensional hanya akan memicu konflik untuk mencegah hal itu terjadi dibutuhkanlah model sosialisasi baru yang memberikan ruang aspirasi dan penyaluran pengetahuan yang setara yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat.

3.2 Distribusi Kuasa dan Produksi Pengetahuan Melalui Sosialisasi Partisipatif

Wacana yang berpusat pada “Pembangunan Ekonomi” dan “Kepariwisata Modern” telah menjadi narasi yang didominasi oleh rezim kebenaran pihak dominan yang ingin mengatur tata kelola pembangunan, narasi ini kemudian dibangun diatas logika neoliberal yang mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, dan juga dorongan untuk meningkatkan ekonomi daerah, semua itu terkemas sebagai bentuk tujuan tertinggi yang universal dan sulit dibantah (Bianchi, 2018). Konteks neoliberalisme memandang bahwa pembangunan objek wisata besar bisa dijustifikasi sebagai kemajuan suatu wilayah dimana semua aspek lain seperti sosial, kultural, dan ekologis tidak punya pilihan melainkan tunduk pada impresi ekonomi. (Foucault & Gordon, 1980) mengutarakan bahwa setiap rezim kebenaran dikelola melalui ritual, aparatus, dan juga otoritas tertentu. Pembangunan objek wisata tertentu seringkali disertai dengan serangkaian ritual yang dikenal masyarakat seperti presentasi studi kelayakan, audiensi yang sifatnya formalitas, serta pemberitaan positif di berbagai media, keseluruhan ritual inilah yang mendorong produksi terbentuknya kebenaran tunggal bahwa pembangunan itu baik dan bermanfaat yang lama kelamaan memberikan legitimasi kepada berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dan pengembang.

Realita yang banyak dijumpai dalam pembangunan objek wisata kerap terdapat narasi yang merasionaliskan pembangunan dengan mengagungkan manfaat ekonomi, analisis kalkulasi keuntungan yang bisa didapatkan dari proyek tersebut menjadi sandaran bahkan dilebihkan sebagai penyelamat ekonomi sebuah daerah (Ukaegbu et al., 2020) Demi memuluskan jalan agar proyek pembangunan dapat diterima disusunlah Dokumen AMDAL, studi kelayakan, bahkan dokumen dengan kalkulasi finansial sebagai instrumen eksklusif yang membenarkan kebutuhan akan objek wisata tersebut. Namun harus digaris bawahi bayang diinterpretasikan dalam dokumen legal itu merupakan sesuatu yang kurang dipahami oleh masyarakat yang terlibat, masyarakat terjerat pada bahasa yang penuh dengan perhitungan yang kompleks, yang kemudian mengesampingkan pengetahuan lokal yang sifatnya kontekstual, holistik, dan naratif- seperti nilai spiritual sebuah situs budaya, sejarah kolektif pemanfaatan lahan atau sistem kearifan lokal dalam menjaga ekosistem. Pengetahuan lokal masyarakat kerap kali dikesampingkan dan dicap sebagai “tidak ilmiah”,

“tradisional”, bahkan “penghambat kemajuan”, akhirnya mereka dipinggirkan dalam ruang pengetahuan yang kemudian mendiskreditkan mereka dari proses pengambilan keputusan terkait keputusan yang mungkin saja menentukan masa depan mereka.

Kekhawatiran yang muncul akan dominasi satu pihak akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang mampu mendorong sentimen kepada pihak lainnya, selama ini pemerintah selalu dianggap sebagai penguasa yang memegang wacana sementara subjek dari wacana itu adalah masyarakat lokal. Ini tentu akan mendorong kebingungan peran yang berujung pada perebutan kekuasaan (Abd Radjak et al., 2024). Masyarakat sering dipandang sebagai pihak yang pasif yang hanya berperan sebagai penerima manfaat yang sering kali dipandang sebagai penghambat. Dari garis inilah proses sosialisasi harusnya masuk dan dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi, pembagian legitimasi yang timpang diperbaiki dengan menggunakan ruang komunikasi setara dimana berbagai pihak diberikan kesempatan yang sama dalam mengutarakan pendapat dan membagi pengetahuan yang mereka miliki. Mendorong sosialisasi yang baik mampu mengurangi pandangan negatif terhadap kuasa represif yang dimiliki oleh pemegang wacana yang selama ini selalu memicu resistensi. Bentuk resistensi yang sering diliat bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti aksi protes terbuka, pembentukan aliansi, hingga pemanfaatan media untuk membuat dan menyebarkan narasi tandingan yang mendengar mengembangkan model diskusi dimana pihak masyarakat memiliki kontribusi yang besar dapat di yakini sebagai jalan penentu lahirnya model wisata berkelanjutan.

Kritikan terhadap wacana dominan pembangunan ekonomi dan kepariwisataan yang selama ini di pegang oleh pemerintah dan pengembang haruslah di dekonstruksi secara sistematis, beberapa studi literatur menawarkan kerangka alternatif seperti pariwisata berkelanjutan yang berkeadilan, pariwisata berbasis komunitas yang keseluruhannya menolak model yang hanya mempertanyakan untung rugi atau dapat dikatakan sebagai penolakan terhadap imperialisme model barat (Duxbury et al., 2021, Fletcher, 2019). Kerangka yang dibangun haruslah melalui proses dialog yang mendorong pengakuan terhadap pluralitas pengetahuan dan pembagian manfaat yang adil sebagai tujuan utama.

3.3 Implikasi Sosialisasi Partisipatif Terhadap Pencegahan Konflik dan Pembangunan Kepercayaan

Perubahan bentuk sosialisasi yang awalnya berbentuk penyampaian satu arah mampu menciptakan implikasi dasar yang mengubah bentuk kedudukan masyarakat dalam sebuah objek pembangunan, tidak lagi hanya sebagai subjek pasif tetapi agen aktif. Didalam sebuah proses sosialisasi terdapat bagian pengambilan keputusan yang menjadi urgensi mendesak terkait sebuah proyek pembangunan pariwisata. Inti dari persoalan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dengan pembangunan biasanya tidak memiliki kesempatan yang sama dalam ruang pengambilan keputusan itu, (Ottaviani et al., 2023) mengutarakan bahwa jika hal tersebut berkaitan dengan pariwisata maka alangkah baiknya menggunakan metode partisipasi, partisipasi merupakan kondisi dimana semua pihak yang berkaitan dengan pembangunan objek wisata dilibatkan. Maka mengadaptasi metode itu terbangunlah model sosialisasi partisipasi yang dalam pembangunan kepariwisataan mampu mengalokasikan ruang bagi masyarakat untuk kiranya menyalurkan kepentingan, kekhawatiran, serta aspirasi mereka secara langsung. Merubah model sosialisasi menjadi ruang diskusi pengetahuan

akan mendorong lahirnya kepercayaan masyarakat, ketika suara mereka didengarkan dan juga terdapat ruang bagi mereka untuk mengambil keputusan maka fondasi kepercayaan pun akan mulai terbangun. Adanya kepercayaan mampu mengurangi kecurigaan dan persepsi buruk yang selama ini mengarah kepada pihak berkuasa, hal ini juga akan mampu meredupkan narasi ketidakadilan yang selama ini selalu dikumandangkan yang tanpa disadari merupakan pencetus munculnya konflik (Williams & Baláz, 2021).

Impikasi dasar kedua dari perubahan bentuk sosialisasi partisipatif mampu dilihat dari pemanfaatannya sebagai arena dimana pengetahuan teknis-instrumental pengembang seperti data ekonomi, desain struktur, manfaat pembangunan disatukan dengan pengetahuan lokal masyarakat misalnya pengetahuan sejarah, siklus ekologi, dan nilai kultural yang ada disekitar lokasi pembangunan. Pertemuan dan penyatuan ini dapat menghasilkan pengetahuan baru yang lebih tajam, dapat diterima bersama serta berkelanjutan (Tengö et al., 2017).

Sosialisasi partisipatif yang dilakukan secara intensif pada tahap pra-pembangunan dapat menjadi *early warning system* yang mendeteksi potensi konflik yang ada, ketika pihak pemegang kekuasaan (Pemerintah dan Pengembang) dan agen aktif (Masyarakat) memiliki kepentingan dan keluhan yang muncul dipermukaan keseluruhan hal itu bisa diakomodasi dalam forum dialog yang inklusif. Proses sosialisasi partisipatif yang berulang tidak hanya mendorong kepercayaan tetapi lebih jauh akan menguatkan modal sosial horizontal yang ada didalam sebuah komunitas. Modal sosial yang terdiri dari norma timbal balik, jaringan, dan kepercayaan antarawarga dapat menjadi penunjang penting dalam kehidupan sosial yang dirasa penting sebagai alat instrumen menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang selama ini selalu menjadi lingkaran kekhawatiran di dalam sebuah pembangunan (Putnam, 1994). Sosialisasi yang menekankan pada partisipasi aktif juga mampu menjadi awal terbentuknya jaringan kolaboratif pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, LSM lokal, akademisi dan figur lokal yang dihormati. Jaringan ini nantinya bersatu sebagai infrastruktur sosial yang mengawasi secara bersama dan menyelesaikan masalah bersama selama proyek pembangunan objek wisata berlangsung, akhirnya sinergi kerjasama yang ada mampu menciptakan proteksi yang lebih tahan terhadap gesekan kepentingan (Berkes, 2017).

Garis besar dari adanya perubahan proses sosialisasi adalah terbentuknya legitimasi sosial-politik yang baik. Selama ini pembangunan objek wisata sering kali di cap sebagai upaya perusakan lingkungan dan momen menakutkan yang mengancam masyarakat sekitar sehingga pembangunan ini kerap kali terlihat sebagai sebuah proyek yang 'dipaksakan' akhirnya proyek pembangunan yang telah direncanakan sangat rentan terhadap resistensi dan tidak menutup kemungkinan terjadi pembatalan. Jika sebuah proyek pembangunan objek wisata lahir dari adanya partisipasi yang kemudian memiliki izin sosial yang kuat maka tentu akan didapati pula keuntungan yang lebih dari sekedar keuntungan ekonomi tetapi juga mencegah konflik yang mungkin timbul dengan komunitas lokal (Ólafsdóttir et al., 2024). Masyarakat tidak hanya mengizinkan tetapi terdorong untuk mendukung pembangunan bahkan melindungi hasil dari pembangunan itu, hal ini bisa didapatkan ketika masyarakat juga dilibatkan dalam prosesnya dan memperoleh manfaat setelah pembangunan objek wisata diselesaikan. Akhirnya, mengubah model sosialisasi dari yang awalnya hanya sebagai ruang

menginformasikan rencana menjadi ruang partisipasi tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi menjadi investasi jangka panjang yang menjaga kedamaian sosial, ketahanan komunitas, dan keberlanjutan dalam bisnis pariwisata. Menerapkan sosialisasi partisipatif menjadi sebuah win-win solusi, langkah ini sederhana namun dalam eksekusi masih banyak diabaikan, realitasnya langkah mudah memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan masyarakat justru akan memberikan penguatan modal sosial yang akhirnya berakhir pada keberlanjutan sebuah proyek pembangunan.

4. KESIMPULAN

Secara garis besar pembangunan objek wisata memang memberikan manfaat yang besar, namun dalam prosesnya pembangunan itu kerap kali disertai dengan sentilan kepentingan yang mendorong munculnya resistensi dari pihak-pihak yang merasa tidak sejalan dengan pembangunan tersebut. Realita yang sering dijumpai selama ini menunjukkan bahwa ketika wacana 'pembangunan' dan 'kepariwisataan' dikumandangkan maka masyarakat akan merasakan dorongan untuk menolak. Hal ini dikarenakan selama ini mereka hanya berposisi sebagai penerima pasif, yang menerima segala bentuk penyampaian aturan tanpa pernah diberikan ruang untuk mewadahi aspirasi mereka. Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undang, AMDAL, dan surat perizinan di jadikan sebagai alat kuasa yang mengekang masyarakat, selain itu kondisi ini diperparah dengan sosialisasi konvensional yang berbentuk penyampaian satu arah sehingga tidak ada korelasi kepentingan antara pihak pemerintah, pengembang dan masyarakat. Akibatnya, di setiap rencana pembangunan objek wisata terdapat potensi penolakan yang bisa berakhir kepada konflik.

Untuk itu mencegah terjadinya konflik dalam rencana pembangunan objek wisata dapat dilakukan dengan perombakan terhadap model sosialisasi yang selama ini banyak digunakan, dari model yang konvensional menjadi model yang partisipatif. Perubahah model ini membuka ruang inklusif dimana pengetahuan teknis yang dimiliki pihak pemerintah dan pengembang bersatu dengan pengetahuan lokal masyarakat, sehingga terjadi distribusi kuasa yang adil dan terdapat pengakuan pengetahuan yang beragam. Selain itu model sosialisasi partisipatif mampu menjadi sistem deteksi dini kemungkinan terjadinya konflik, ketika sentimen mulai muncul, ruang diskusi sehat menjadi instrumen utama dalam mewadahi kepentingan serta mendiskusikan opsi penyelesaian masalah yang ada. Membuka ruang sosialisasi partisipatif mampu mendorong kepercayaan masyarakat terhadap rencana pembangunan objek wisata, dengan memberikan mereka ruang untuk menyampaikan aspirasi akan muncul perasaan dihargai sehingga pola pikir mereka juga berubah. Masyarakat yang awalnya pasif mampu menjadi agen aktif yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Radjak, D., Umamur Ra'is, D., & Abd. Rohman. (2024). *Pembangunan masyarakat desa* (M. Safitri Amra, Ed.; ed. ke-1). Forind.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1).
- Berkes, F. (2017). Environmental governance for the Anthropocene? Social-ecological systems, resilience, and collaborative learning. *Sustainability*, 9(7), Article 1232. <https://doi.org/10.3390/su9071232>
- Bianchi, R. (2018). The political economy of tourism development: A critical review. *Annals of Tourism Research*, 70, 88–102. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.08.005>
- Burchill, G., Gordon, C., & Miller, P. (Eds.). (1991). *The Foucault effect: Studies in governmentality with two lectures by and an interview with Michel Foucault*. Harvester Wheatsheaf.
- Duxbury, N., Bakas, F. E., de Castro, T. V., & Silva, S. (2021). Creative tourism development models towards sustainable and regenerative tourism. *Sustainability*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su13010002>
- Esteves, A. M., Franks, D., & Vanclay, F. (2012). Social impact assessment: The state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 30(1), 34–42. <https://doi.org/10.1080/14615517.2012.660356>
- Fletcher, R. (2019). Ecotourism after nature: Anthropocene tourism as a new capitalist “fix.” *Journal of Sustainable Tourism*, 27(4), 522–535. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1471084>
- Foucault, M., & Gordon, C. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Li, J., Krishnamurthy, S., Pereira Roders, A., & van Wesemael, P. (2020). Community participation in cultural heritage management: A systematic literature review comparing Chinese and international practices. *Cities*, 96, Article 102476. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102476>
- Ólafsdóttir, R., Bogadóttir, R., Karkut, J., Welling, J. T., Tuulentie, S., Edvardsdóttir, A. G., Vang, E. P., & Karlsdóttir, A. (2024). Arctic cruise tourism and social license to operate: Exploring social acceptance and trust in cruise tourism. *Journal of Land Use Science*, 19(1), 170–185.
- Ottaviani, D., Demiröz, M., Szemző, H., & De Luca, C. (2023). Adapting methods and tools for participatory heritage-based tourism planning to embrace the four pillars of sustainability. *Sustainability*, 15(6), Article 4741. <https://doi.org/10.3390/su15064741>
- Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & Management*, 52(2), 183–199. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>
- Putnam, R. D. (1994). Social capital and public affairs. *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*, 47(8), 5–19.

- Rusneni, R., Nursini, N., Rahman, A. R., & Suhab, S. (2025). Analysis of the role of tourism in Indonesia's economic growth (pp. 4–15). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_2
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stronge, D. C., Kannemeyer, R. L., & Edwards, P. (2024). Building social licence to operate: A framework for gaining and maintaining meaningful, trustworthy relationships. *Resources Policy*, 89, Article 104566.
- Tengö, M., Hill, R., Malmer, P., Raymond, C. M., Spierenburg, M., Danielsen, F., Elmqvist, T., & Folke, C. (2017). Weaving knowledge systems in IPBES, CBD and beyond—Lessons learned for sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 26–27, 17–25. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.005>
- Ukaegbu, M. O., Carr, N., & Okpoko, P. U. (2020). Local people's perceptions of the potential implications of cultural revitalisation through tourism in Benin, Nigeria. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 18(4), 455–469. <https://doi.org/10.1080/14766825.2019.1702992>
- Vanclay, F., & Hanna, P. (2019). Conceptualizing company response to community protest: Principles to achieve a social license to operate. *Land*, 8(6), Article 101. <https://doi.org/10.3390/land8060101>
- Williams, A. M., & Baláž, V. (2021). Tourism and trust: Theoretical reflections. *Journal of Travel Research*, 60(8), 1619–1634. <https://doi.org/10.1177/0047287520961177>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>